



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA BANDUNG

NOMOR : 050/Kep.777-BAPPEDA/2010

TENTANG

KELOMPOK KERJA TEKNIS (POKJANIS)

PENYUSUNAN STRATEGI PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR
PERKOTAAN (SPPIP) DAN RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
PRIORITAS (RPKPP) KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : Surat Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Nomor : PR.01.03-DC/50 tanggal 17 Februari 2010 perihal Penyusunan Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) dan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) jo. Surat Plh. Direktur Pengembangan Permukiman Nomor : PR.02.03-CK/39 tanggal 18 Februari 2010 perihal Proses Pelaksanaan Pendampingan Penyusunan Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan dan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas;
- Menimbang : a. bahwa dalam kerangka pelaksanaan pembangunan, Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) dan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) menjadi instrumen penting untuk menjamin terwujudnya pembangunan yang serasi antar sektor dan antara sektor dengan alokasi ruangnya, utamanya yang terkait dengan pengembangan permukiman dan infrastruktur perkotaan;
- b. bahwa dengan adanya urgensi kebutuhan terhadap Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) dan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP), Pemerintah melalui Direktorat Pengembangan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum memberikan bantuan teknis penyusunan dan pendanaan yang merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat;
- c. bahwa...

- c. bahwa sebagai salah satu prasyarat penerimaan Bantuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf b sesuai ketentuan Buku Panduan Pelaksanaan Penyusunan Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) dan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya dan amanat Surat Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum jo. Surat Plh. Direktur Pengembangan Permukiman sebagaimana tertuang dalam konsideran Membaca, Pemerintah Kota Bandung perlu menetapkan Kelompok Kerja Teknis;
- d. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Kelompok Kerja Teknis Penyusunan Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) Kota Bandung dan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) Kota Bandung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 7. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
 9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wlayah (RTRW) Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006;

11. Peraturan...

11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009-2013;
13. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota dan Instruksi Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Kelompok Kerja Teknis (Pokjanis) Penyusunan Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) dan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan keanggotaan, uraian tugas dan kedudukan Kelompok Kerja Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I, II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Kelompok Kerja Teknis (Pokjanis) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA dibentuk dengan tujuan meningkatkan peran aktif Pemerintah Kota Bandung dalam proses Penyusunan Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP), mendorong tumbuhnya rasa memiliki pada Pemerintah Kota Bandung terhadap Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) yang disusun sehingga akan terbentuk komitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mengimplementasikannya, yang mempunyai tugas bersama-sama dengan pihak ketiga yang ditunjuk oleh Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat untuk menyusun dan merumuskan Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP), sekaligus sebagai pelaksana dari kegiatan penyusunan Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP).
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja Teknis (Pokjanis) mendapatkan konsultasi dan panduan dari Koordinator Wilayah, Direktorat Pengembangan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum selaku Tim Supervisi serta pendampingan dan fasilitasi dari pihak ketiga dan berpedoman kepada Buku Panduan Pelaksanaan Penyusunan Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) dan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 yang dialokasikan pada Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat.

KEENAM...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 Nopember 2010

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19631221 198503 1 007

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 050/Kep.777-BAPPEDA/2010

TANGGAL : 5 Nopember 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA TEKNIS (POKJANIS)
PENYUSUNAN STRATEGI PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR
PERKOTAAN (SPPIP) KOTA BANDUNG DAN RENCANA PENGEMBANGAN
KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS (RPKPP) KOTA BANDUNG

I. TIM PENGARAH

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung.
- Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Bandung.

II. TIM TEKNIS

Koordinator :

Kepala Bidang Perencanaan Tata Ruang, Sarana dan Prasarana pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Bandung.

Anggota :

1. Kepala Bidang Perencanaan dan Tata Ruang pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Perencanaan Tata Ruang, Sarana dan Prasarana pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;
4. Kepala Sub Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang pada Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Bandung;
6. Kepala Seksi Teknik Penyehatan Lingkungan pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
Kota Bandung;

7. Kepala...

7. Kepala Seksi Rencana Teknis Prasarana Kota pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;
8. Kepala Seksi Pengembangan Perumahan pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;
9. Kepala Seksi Rencana Peremajaan dan Pengembangan Kota pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;
10. Kepala Seksi Perencanaan pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung;
11. Kepala Seksi Perencanaan pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung;
12. Kepala Seksi Jaringan Trans Jalan pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
13. Kepala Seksi Pemanfaatan Aset Daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
14. Kepala Seksi Perencanaan Air Bersih pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
15. Kepala Seksi Perencanaan Air Limbah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
16. Kepala Seksi Perencanaan pada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;
17. Ketua Masyarakat Peduli Perumahan Permukiman Indonesia (MP3I);
18. Ketua Real Estate Indonesia (REI) Jawa Barat;
19. Kelompok Keahlian Perumahan dan Permukiman (KKPP), Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK), Institut Teknologi Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi

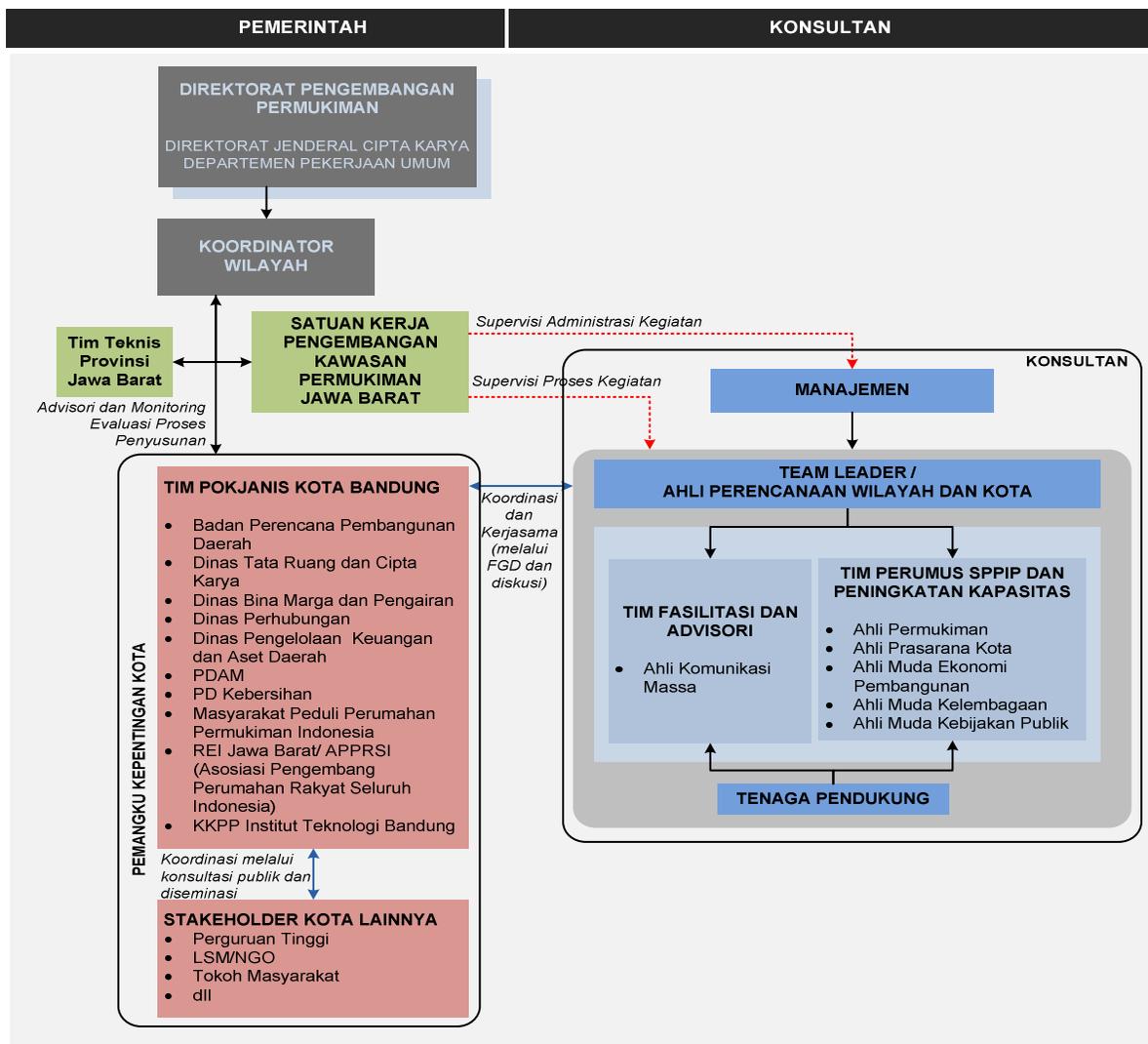
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
 NOMOR : 050/Kep.777-BAPPEDA/2010
 TANGGAL : 5 Nopember 2010

KEDUDUKAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA TEKNIS (POKJANIS)
 PENYUSUNAN STRATEGI PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR
 PERKOTAAN (SPPIP) KOTA BANDUNG DAN RENCANA PENGEMBANGAN
 KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS (RPKPP) KOTA BANDUNG



Gambar 1. Organisasi Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) dan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) Kota Bandung

WALIKOTA BANDUNG,
 TTD.
 DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19631221 198503 1 007

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 050/Kep.777-BAPPEDA/2010

TANGGAL : 5 Nopember 2010

URAIAN TUGAS KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA TEKNIS (POKJANIS)
PENYUSUNAN STRATEGI PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR
PERKOTAAN (SPPIP) KOTA BANDUNG DAN RENCANA PENGEMBANGAN
KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS (RPKPP) KOTA BANDUNG

TIM PENGARAH :

Pembina :

- a. memberikan pengarahan, usul dan saran atas kebijakan dan strategi yang dihasilkan dalam penyusunan Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) dan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP);
- b. memberikan pembinaan atas hasil kebijakan dan strategi yang diusulkan dalam penyusunan Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) dan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP).

Ketua :

- a. memberikan pengarahan atas Strategi Pengembangan Kota (SPK) Bandung, kebijakan perencanaan pembangunan dan perencanaan Tata Ruang di Kota Bandung terkait seluruh aspek perkotaan terutama permukiman dan infrastruktur perkotaan;
- b. memberikan usul dan saran atas kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan dan perencanaan tata ruang yang diusulkan dalam Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) dan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) Kota Bandung;
- c. memberikan arahan dalam mengidentifikasi kawasan pengembangan permukiman yang diprioritaskan;
- d. memberikan pengarahan atas kebijakan perencanaan pembangunan dan perencanaan Tata Ruang Kota Bandung, terutama permukiman dan infrastruktur perkotaan;

e. memberikan...

- e. memberikan usul dan saran atas kebijakan dan strategi perencanaan permukiman dan infrastruktur yang diusulkan dalam Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) dan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) Kota Bandung;
- f. memberikan arahan dalam mengidentifikasi kawasan pengembangan permukiman yang diprioritaskan.

Wakil Ketua :

Membantu Ketua dalam hal :

- a. memberikan pengarahan atas Strategi Pengembangan Kota (SPK) Bandung, kebijakan perencanaan pembangunan dan perencanaan Tata Ruang di Kota Bandung terkait seluruh aspek perkotaan terutama permukiman dan infrastruktur perkotaan;
- b. memberikan usul dan saran atas kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan dan perencanaan tata ruang yang diusulkan dalam Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) dan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) Kota Bandung;
- c. memberikan arahan dalam mengidentifikasi kawasan pengembangan permukiman yang diprioritaskan;
- d. memberikan pengarahan atas kebijakan perencanaan pembangunan dan perencanaan Tata Ruang Kota Bandung, terutama permukiman dan infrastruktur perkotaan;
- e. memberikan usul dan saran atas kebijakan dan strategi perencanaan permukiman dan infrastruktur yang diusulkan dalam Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) dan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) Kota Bandung;
- f. memberikan arahan dalam mengidentifikasi kawasan pengembangan permukiman yang diprioritaskan.

Sekretaris...

Sekretaris :

- a. mengagendakan dan melaksanakan kegiatan terkait diskusi Pokjanis pada penyusunan Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan dan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas Kota Bandung antara lain kegiatan FGD, Konsultasi Publik dan kegiatan Disseminasi;
- b. memonitor pelaksanaan kegiatan penyusunan Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) dan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) Kota Bandung agar sesuai jadwal;
- c. membantu merumuskan semua hasil pertemuan dan diskusi bersama tim Pokjanis dan menindaklanjuti sesuai tupoksi masing-masing anggota pokjanis;
- d. memfasilitasi Tim Pengarah dan Tim Teknis dalam hal merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan kota serta strategi permukiman dan infrastruktur perkotaan;
- e. membantu kelancaran proses kegiatan pelaksanaan Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan dan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas.

TIM TEKNIS :

Koordinator :

Kepala Bidang Perencanaan Tata Ruang, Sarana dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung :

- a. mengkoordinir seluruh kegiatan pelaksanaan penyusunan Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan dan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas;
- b. memberikan pengarahan terkait perencanaan tata ruang dan perencanaan sarana dan prasarana Kota Bandung pada penyusunan Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan dan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas;
- c. memberikan pengarahan pada perumusan visi dan misi, Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan dan kebutuhan program strategis pada penyusunan Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan dan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas;
- d. turut serta dalam proses kegiatan peningkatan kapasitas seperti FGD 1, FGD 3, FGD 4, kolokium, konsultasi publik dan disseminasi pada Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan dan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas.

Anggota...

Anggota :

1. Kepala Bidang Perencanaan dan Tata Ruang Pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung :

- a. memberikan pengarahan perencanaan tata ruang khususnya terkait perumahan dan permukiman, rencana teknis prasarana permukiman dan rencana peremajaan permukiman pada penyusunan Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan dan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas;
- b. memberikan pengarahan pada perumusan visi dan misi, Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan dan kebutuhan program strategis pada penyusunan Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan dan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas;
- c. turut serta dalam proses kegiatan peningkatan kapasitas seperti FGD 1, FGD 3, FGD 4, kolokium, konsultasi publik dan disseminasi pada Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan dan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas.

2. Kepala Bidang Perumahan Pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung :

- a. memberikan pengarahan kebijakan dan strategi perumahan dan permukiman serta alternatif pengembangannya di Kota Bandung pada penyusunan Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan dan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas;
- b. memberikan pengarahan pada perumusan visi dan misi, Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan dan kebutuhan program strategis pada penyusunan Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan dan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas;
- c. turut serta dalam proses kegiatan peningkatan kapasitas seperti FGD 1, FGD 2, FGD 3, FGD 4, kolokium, konsultasi publik dan disseminasi pada Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan dan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas.

3. Kepala...

3. Kepala Sub Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung :

- a. membantu menyediakan studi kebijakan, data dan informasi terkait perencanaan permukiman dan infrastruktur perkotaan pada tahap perumusan permasalahan dan kebutuhan penanganan dalam penyusunan Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan dan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas kota Bandung;
- b. memberikan arahan dan membantu terkait aspek sarana dan prasarana kota pada perumusan visi dan misi, strategi pengembangan permukiman dan infrastruktur perkotaan, dan kebutuhan program strategis pada penyusunan Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan Kota Bandung;
- c. turut serta dalam proses kegiatan peningkatan kapasitas seperti Focus Group Discussion/FGD (Diskusi Kelompok Terarah), Kolokium, Konsultasi Publik dan Disseminasi pada Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan dan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas.

4. Kepala Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung :

- a. membantu menyediakan data dan informasi terkait kebijakan, perencanaan pembangunan dan perencanaan tata ruang di kota Bandung pada tahap perumusan permasalahan dan kebutuhan penanganan, dalam penyusunan Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan dan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas kota Bandung;
- b. menyusun dan memberikan pengarahannya terkait aspek tata ruang kota pada perumusan visi dan misi, strategi pengembangan permukiman dan infrastruktur perkotaan, dan kebutuhan program strategis di wilayah kota Bandung dalam penyusunan Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan kota Bandung;
- c. turut serta dalam proses kegiatan peningkatan kapasitas seperti Focus Group Discussion (FGD), Kolokium, Konsultasi Publik, dan Disseminasi pada Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan dan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas.

5. Kepala...

5. Kepala Seksi Teknik Penyehatan Lingkungan pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung.

- a. membantu menyediakan data dan informasi terkait infrastruktur pada tahap perumusan permasalahan, potensi dan kebutuhan penanganan dalam penyusunan Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan dan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas Kota Bandung;
- b. membantu dan memberikan pengarahannya pada perumusan visi dan misi, strategi pengembangan permukiman dan infrastruktur perkotaan, dan kebutuhan program strategis Kota Bandung pada penyusunan Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan kota Bandung;
- c. turut serta dalam proses kegiatan peningkatan kapasitas seperti Focus Group Discussion (FGD), Kolokium, Konsultasi Publik, dan Disseminasi pada Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan dan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas.

6. Kepala Seksi Rencana Teknis Prasarana Kota pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung :

- a. membantu menyediakan data dan informasi terkait perencanaan teknis prasarana pada tahap perumusan permasalahan, potensi dan kebutuhan penanganan dalam penyusunan Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan dan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas kota Bandung;
- b. membantu dan mengarahkan pada perumusan visi dan misi, strategi pengembangan permukiman dan infrastruktur perkotaan, dan kebutuhan program strategis pada penyusunan Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan kota Bandung;
- c. turut serta dalam proses kegiatan peningkatan kapasitas seperti Focus Group Discussion (FGD), Kolokium, Konsultasi Publik, dan Disseminasi pada Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan dan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas.

7. Kepala...

7. Kepala Seksi Pengembangan Perumahan pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung :

- a. membantu menyediakan data dan informasi terkait persebaran permukiman per kategori permukiman yang ada saat ini dan pengembangan perumahan/permukiman pada tahap perumusan permasalahan, potensi dan kebutuhan penanganan pada penyusunan Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan dan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas Kota Bandung;
- b. memberikan arahan alternative pengembangan permukiman dan perumusan visi dan misi, strategi pengembangan permukiman dan infrastruktur perkotaan, dan kebutuhan program strategis pada penyusunan penyusunan Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan Kota Bandung;
- c. turut serta dalam proses kegiatan peningkatan kapasitas seperti Focus Group Discussion (FGD), Kolokium, Konsultasi Publik, dan Disseminasi pada Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan dan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas.

8. Kepala Seksi Rencana Peremajaan dan Pengembangan Kota pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung :

- a. membantu menyediakan data dan informasi terkait peremajaan dan pengembangan perumahan/permukiman di Kota Bandung pada tahap perumusan permasalahan, potensi dan kebutuhan penanganan dalam penyusunan Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) dan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) Kota Bandung;
- b. memberikan arahan alternative rencana peremajaan permukiman dan perumusan visi dan misi, strategi pengembangan permukiman dan infrastruktur perkotaan, dan kebutuhan program strategis pada penyusunan SPPIP kota Bandung;
- c. turut serta dalam proses kegiatan peningkatan kapasitas seperti Focus Group Discussion (FGD), Kolokium, Konsultasi Publik, dan Disseminasi pada Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan dan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas.

9. Kepala...

9. Kepala Seksi Perencanaan pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung :

- a. membantu menyediakan data dan informasi kondisi dan rencana pengembangan jaringan jalan di kota Bandung pada tahap perumusan permasalahan, potensi dan kebutuhan penanganan dalam penyusunan Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan dan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas Kota Bandung;
- b. membantu mengarahkan dan merumuskan visi dan misi, strategi permukiman dan infrastruktur dan kebutuhan program strategis terkait jaringan jalan dan jaringan drainase pada penyusunan, potensi dan kebutuhan penanganan dalam penyusunan Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan Kota Bandung;
- c. turut serta dalam proses kegiatan peningkatan kapasitas seperti Focus Group Discussion (FGD), Kolokium, Konsultasi Publik, dan Disseminasi pada Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan dan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas.

10. Kepala Seksi Jaringan Trans. Jalan pada Dinas Perhubungan Kota Bandung :

- a. membantu menyediakan data dan informasi kondisi sarana dan prasarana transportasi dan rencana pengembangannya pada tahap perumusan permasalahan, potensi dan kebutuhan penanganan dalam penyusunan Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan dan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas Kota Bandung;
- b. membantu mengarahkan dan merumuskan visi dan misi, strategi permukiman dan infrastruktur dan kebutuhan program strategis terkait sarana dan prasarana transportasi pada penyusunan Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan Kota Bandung;
- c. turut serta dalam proses kegiatan peningkatan kapasitas seperti Focus Group Discussion (FGD), Kolokium, Konsultasi Publik, dan Disseminasi pada Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan dan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas.

11. Kepala...

11. Kepala Seksi Pemanfaatan Aset Daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung :
 - a. membantu menyediakan data dan informasi persebaran tanah aset pemerintah kota yang digunakan untuk permukiman di Kota Bandung pada penyusunan Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan dan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas Kota Bandung;
 - b. membantu mengarahkan visi dan misi, strategi pengembangan permukiman dan infrastruktur dan kebutuhan program strategis pada kawasan yang masuk aset pemerintah Kota;
 - c. turut serta dalam proses kegiatan peningkatan kapasitas seperti Focus Group Discussion (FGD), Kolokium, Konsultasi Publik, dan Disseminasi pada Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan dan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas.

12. Kepala Seksi Perencanaan Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung :
 - a. membantu menyediakan data dan informasi kondisi dan sistem pelayanan air bersih untuk permukiman di kota Bandung pada tahap perumusan permasalahan, potensi dan kebutuhan penanganan dalam penyusunan Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan dan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas Kota Bandung;
 - b. mengarahkan dan membantu merumuskan visi dan misi, strategi dan kebutuhan program strategis pengembangan air bersih pada penyusunan strategi permukiman dan infrastruktur perkotaan di Kota Bandung;
 - c. turut serta dalam proses kegiatan peningkatan kapasitas seperti Focus Group Discussion (FGD), Kolokium, Konsultasi Publik, dan Disseminasi pada Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan dan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman prioritas.

13. Kepala Seksi Perencanaan Air Limbah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung :
 - a. membantu menyediakan data dan informasi kondisi pemetaan potensi dan permasalahan air limbah yang ada di permukiman kota Bandung pada tahap perumusan permasalahan, potensi dan kebutuhan penanganan dalam penyusunan Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan dan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas Kota Bandung;
 - b. membantu mengarahkan dan merumuskan visi dan misi, strategi dan kebutuhan program strategis sistem air limbah pada penyusunan SPPIP Kota Bandung;
 - c. turut serta dalam proses kegiatan peningkatan kapasitas seperti Focus Group Discussion (FGD), Kolokium, Konsultasi Publik, dan Disseminasi pada Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan dan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas.

14. Kepala...

14. Kepala Seksi Perencanaan Kebersihan Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung :
- a. membantu menyediakan data dan informasi kondisi dan sistem pelayanan persampahan untuk permukiman pada tahap perumusan permasalahan, potensi dan kebutuhan penanganan pada penyusunan Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan dan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas Kota Bandung;
 - b. membantu mengarahkan dan merumuskan visi dan misi, strategi , kebutuhan program strategis, dalam perencanaan sistem pelayanan persampahan pada penyusunan SPPIP Kota Bandung;
 - c. turut serta dalam proses kegiatan peningkatan kapasitas seperti Focus Group Discussion (FGD), Kolokium, Konsultasi Publik, dan Disseminasi pada Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan dan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas.
15. Masyarakat Peduli Perumahan Permukiman Indonesia (MP3I) :
- a. membantu menyediakan data dan informasi permasalahan dan potensi persebaran permukiman di Kota Bandung;
 - b. memberikan masukan strategi pengembangan permukiman dan infrastruktur perkotaan di Kota Bandung;
 - c. turut serta dalam proses kegiatan peningkatan kapasitas seperti Focus Group Discussion (FGD), Kolokium, Konsultasi Publik, dan Disseminasi pada Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan dan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas.
16. Real Estate Indonesia (REI) Jawa Barat :
- a. membantu menyediakan data dan informasi permasalahan dan potensi persebaran permukiman Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Bandung;
 - b. memberikan masukan strategi pengembangan permukiman (bagi MBR dan non MBR) dan infrastruktur perkotaan di Kota Bandung;
 - c. turut serta dalam proses kegiatan peningkatan kapasitas seperti Focus Group Discussion (FGD), Kolokium, Konsultasi Publik, dan Disseminasi pada Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan dan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas.

17. Kepala...

17. Kelompok Keahlian Perumahan dan Permukiman (KKPP), Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) Institut Teknologi Bandung :

- a. membantu menyediakan data dan informasi permasalahan dan potensi permukiman MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) dan non MBR di Kota Bandung;
- b. membantu dan mengarahkan penyusunan tipologi permukiman di Kota Bandung;
- c. memberikan masukan strategi pengembangan permukiman (bagi MBR dan non MBR) dan infrastruktur perkotaan di Kota Bandung;
- d. turut serta dalam proses kegiatan peningkatan kapasitas seperti Focus Group Discussion (FGD), kolokium, konsultasi publik dan disseminasi pada Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan dan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

